

**RANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PENGUSAHAAN JALAN TOL
PADA BADAN LAYANAN UMUM PENGEMBANGAN WILAYAH
SURABAYA MADURA**

**Anak Agung Gde Satia Utama, SE.,M.Ak.,Ak.CA
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga
Email: agungdesatya@gmail.com**

ABSTRAK

Undang-undang (UU) No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka peluang dan tantangan baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah dan menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) merupakan satuan kegiatan yang berpotensi untuk dikelola secara lebih efisien dan efektif melalui pola BLU. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu rancangan Sistem Informasi Akuntansi BLU. Dukungan dari infrastruktur teknologi dan informasi sangat mutlak diperlukan dalam proses perancangannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-exploratory research. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan pengamatan serta data sekunder yaitu: dokumentasi tertulis dari BPWS. Teknik analisis yang digunakan adalah proses coding dari hasil wawancara dan dokumentasi tertulis. Dalam proses penelitian dijelaskan secara detail mekanisme penelitian perancangan sistem informasi akuntansi jalan tol sesuai tahapan pengembangan sistem dengan menggunakan alur input-proses-output. Perancangan sistem informasi akuntansi perusahaan jalan tol pada BLU-BPWS dimulai dari format struktur organisasi BLU, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi database. Context Diagram, Data Flow Diagram dan Entity Relationship Diagram juga dibuat dalam pengembangan sistem tersebut. Rancangan sistem informasi akuntansi perusahaan jalan tol pada BLU-BPWS diharapkan dapat membantu proses akuntansi jalan tol Suramadu.

Kata Kunci: BLU, BPWS, Rancangan Sistem Informasi Akuntansi.

ABSTRACT

Act (Act) No. 1/2004 on State Treasury open new opportunities and challenges for application performance base within the government and the basis for the establishment of government agencies to implement the financial management of the Public Service Agency (BLU) . Regional Development Agency of Surabaya Madura (BPWS) is a unit of activity that has the potential to be managed more efficiently and effectively through BLU pattern . Therefore , it should be made an accounting information system design BLU . Support from infrastruktur technology and information is absolutely necessary in the design process .



Jurnal Ilmiah Akuntansi
dan Humanika
JINAH
Volume 3
Nomor 1
Singaraja, Desember 2013
ISSN 2089-3310

This study used a qualitative - exploratory research approach . The data used is primary data obtained from interviews , observations and pegamatan and secondary data : written documentation of BPWS . The analysis technique used is the coding of the interviews and written documentation . In the course of a study described in detail the mechanism of the accounting information system design research motorway appropriate stages of the development of workflow systems using input - process - output .Accounting information system design concession on BLU - BPWS starting BLU organizational structure format , followed by the identification database . Context Diagram , Data Flow Diagram and Entity Relationship Diagram is also made in the development of such systems . The design of accounting information systems concession on BLU - BPWS expected to help the process of accounting Suramadu toll road .

Keywords : BLU , BPWS , Accounting Information System Design

I. PENDAHULUAN

Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja dimana arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input, tetapi pada output. Salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah termasuk pengelolaan keuangan publik seperti yang tertuang dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang (UU) No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka peluang dan tantangan baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang tersebut menjelaskan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat serta dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip pokok tersebut menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Dalam lingkungan pemerintahan di Indonesia, terdapat banyak satuan kegiatan yang berpotensi untuk dikelola secara lebih efisien dan efektif melalui pola BLU. Salah satunya adalah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS). Instansi ini terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana yang tugas dan fungsi pokoknya adalah pengembangan Jembatan Tol Surabaya Madura (Suramadu) untuk mendorong percepatan dan pertumbuhan social ekonomi di wilayah-wilayah sekitar jembatan.

Badan Pelaksana BPWS (BP-BPWS), sesuai dengan Perpres 27 Tahun 2008, memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur di 3 (tiga) kawasan, yaitu Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Surabaya (600 Ha), Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Madura (600 Ha) dan kawasan khusus di Utara Pulau Madura (600 Ha).

Selain itu, BP-BPWS melaksanakan kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur stimulus di wilayah Madura dalam rangka percepatan kegiatan pembangunan wilayah Suramadu.

Perpres Nomor 27 Tahun 2008, pasal 12 menyebutkan bahwa salah satu tugas BPWS adalah melaksanakan pengelolaan jembatan tol suramadu dan jalan lingkar timur Surabaya (Simpang Juanda-Tanjung Perak). Berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan infrastruktur tersebut diatas, maka BP-BPWS selaku kementerian/lembaga, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu membentuk Badan Layanan Umum (BLU).

Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah BP-BPWS diharapkan dapat mendukung BP-BPWS untuk melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penetapan praktek bisnis yang sehat dalam pengelolaan infrastruktur, khususnya jembatan Suramadu, sehingga keberadaan infrastruktur tersebut dapat mendukung penyediaan alternatif pembiayaan bagi pengembangan wilayah Suramadu dan pembangunan infrastrukturnya.

Septi (2012), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa banyak pengelola institusi pemerintah yang berubah menjadi BLU tidak mengerti system pengelolaan keuangan yang baik dan memadai. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dari 129 satuan kerja yang berbentuk BLU di Yohjakarta, sebagian besar kesulitan dalam pengelolaan keuangan karena disebabkan peraturan yang rumit dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang kompeten. Hal ini tentu saja menjadi masalah karena menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005, apabila institusi pemerintah berubah menjadi BLU, diharapkan dapat memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Seperti halnya dengan BLU-BPWS, diharapkan mampu mengelola keuangan dari pendapatan jalan tol Suramadu untuk pengembangan kinerja dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang dikelola.

Dalam mengakomodasi kebutuhan dari PP No 23 Tahun 2005 tentang pelaksanaan BLU, maka BPWS harus berbenah dalam menyesuaikan pelaksanaan operasionalnya sesuai dengan prinsip efisiensi dan praktek bisnis yang sehat. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu rancangan Sistem Informasi Akuntansi BLU. Dukungan dari infrastruktur teknologi dan informasi sangat mutlak diperlukan dalam proses perancangannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu elemen penting dalam pengelolaan keuangan BLU adalah Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. Dalam pengelolaan keuangan BLU juga meliputi Standar Pelayanan Minimum yang berisi spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

2.2 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU

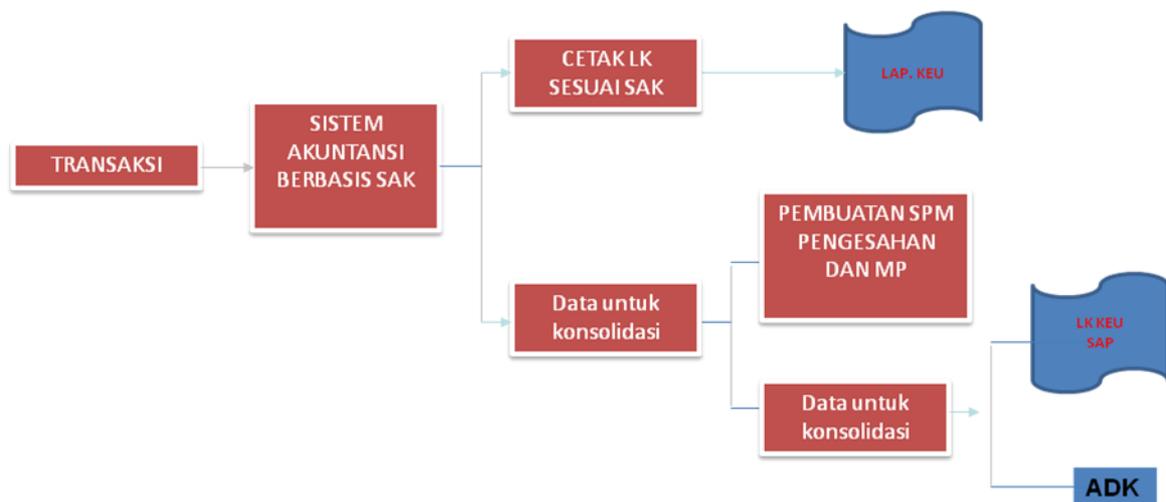
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, sistem akuntansi BLU adalah sebagai berikut:

1. Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
2. Periode akuntansi BLU meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
3. Sistem Akuntansi BLU terdiri dari:
 1. Sistem Akuntansi Keuangan. Sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi yang dirancang agar paling sedikit menyajikan:
 - a. Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. Informasi tentang kemampuan BLU untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
 - c. Informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;
 - d. Informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Sistem akuntansi keuangan BLU memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan BLU adalah basis akrual;
- b. Sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
- c. Sistem akuntansi BLU disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga, BLU mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP.



Gambar 2.1. Diagram Sistem Akuntansi BLU

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.05/2008

BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan jenis layanan BLU dengan mengacu kepada standar akuntansi paling sedikit mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, subsistem akuntansi, dan bagan akun standar

2. Sistem Akuntansi Aset Tetap

Sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap yang paling sedikit mampu menghasilkan:

- a. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU; dan

- b. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap bukan milik BLU namun berada dalam pengelolaan BLU.

Dalam pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap, BLU dapat menggunakan sistem akuntansi barang milik negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. Sistem Akuntansi Biaya

Sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial yang paling sedikit mampu menghasilkan:

- a. Informasi tentang harga pokok produksi;
- b. Informasi tentang biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan; dan
- c. Informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya).

Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam:

- a. Perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU;
- b. Pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLU; dan
- c. Perhitungan tarif layanan BLU.

2.3 Perancangan Sistem Informasi Akuntansi.

Secara umum tahapan pengembangan sistem informasi dimulai dari **(1). Survei Sistem**. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah Identifikasi permasalahan, peluang atau arahan. Investigasi awal untuk melihat kebutuhan pengguna. Langkah berikutnya adalah mengetahui ruang lingkup aplikasi yang akan dikembangkan beserta rencana tahapan pengembangan (mulai dari nol atau prototype). **(2). Analisis Sistem** yaitu sebuah teknik pemecahan masalah yang mendekomposisi sebuah sistem menjadi komponen-komponen penyusunnya dalam rangka mempelajari lebih jauh bagaimana komponen sistem tersebut bekerja dan berinteraksi dengan komponen lainnya untuk suatu tujuan tertentu. **(3). Desain Sistem** digunakan untuk menjawab pertanyaan how ?. Desain berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Manfaat desain sistem adalah memberikan gambaran rancang bangun (blue print) yang lengkap, sebagai penuntun (guideline) bagi programmer dalam membuat aplikasi. **(4). Pembuatan Sistem** yaitu membuat aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat. **(5). Implementasi Sistem** yaitu melakukan persiapan secara matang mengenai perangkat keras, perangkat lunak, ruangan dan fasilitas pendukung lainnya, dan **(6). Pemeliharaan Sistem** adalah proses pemeliharaan sistem yang mencakup seluruh

proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang terkait tentang pengembangan atau perancangan system informasi akuntansi sudah sangat banyak dilakukan pada organisasi profit. Namun, masih sedikit sekali fokus penelitian yang terjadi pada organisasi non-profit dalam bentuk BLU. Keunikan dalam penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yaitu jalan tol Suramadu dari segi perusahaan jalan tol. Pada tahap pembahasannya, penelitian ini menggunakan tahapan pengembangan system informasi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif-Exploratory Research. Penelitian bertujuan mengeksplorasi/mencari/menggali sedalam-dalamnya/seluas-luasnya obyek penelitian, sehingga dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkait dengan perancangan system informasi akuntansi perusahaan jalan tol. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran dan penjelasan mengenai data-data yang diperoleh, namun juga menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut.

3.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dan observasi. Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Tim Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Surabaya Madura. Data sekunder berupa dokumentasi tertulis dari organisasi tempat penelitian, antara lain: Laporan Kegiatan organisasi, Struktur Organisasi, Buku Pengembangan Kawasan, dll. Pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan secara komprehensif dan memanfaatkan alat bantu internet dalam pencarian data awal.

3.3 Teknik Analisis

Dalam melakukan penelitian perancangan sistem informasi perusahaan jalan tol, pertama-tama akan menentukan pertanyaan penelitian yang relevan dengan fenomena sosial yang diteliti. Selanjutnya peneliti melakukan tinjauan pustaka untuk menyusun pedoman wawancara yang akan digunakan sebagai alat penggalian data kepada beberapa narasumber

dari berbagai latar belakang, yang dipandang memiliki kompetensi dalam hal pengelolaan keuangan negara. Proses wawancara direkam dalam bentuk transkrip wawancara, yang kemudian diolah melalui proses penandaan (*coding*) untuk memperoleh gambaran kesinambungan data antar narasumber penelitian. Dengan melakukan proses *coding* akan diperoleh gambaran kecenderungan pola hubungan antara berbagai faktor dominan.

3.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini akan menjelaskan secara detail mekanisme penelitian perancangan sistem informasi akuntansi jalan tol sesuai tahapan pengembangan sistem dan menggunakan alur input-proses-output. Pembuatan alur ini dapat memudahkan dalam proses analisis hingga terbentuknya sebuah model SIA untuk perusahaan jalan tol.

Tabel 3.1. Alur Penelitian Perancangan Sistem Informasi

No	Tahapan Pengembangan SIA	INPUT	PROSES	OUTPUT
1	Survey Sistem	Dokumen Perusahaan, Rencana Kerja, Pengamatan awal, bukti transaksi, dll	Mengidentifikasi masalah, peluang dan arahan.	Ruang lingkup pemilihan rancangan dari nol ataukah prototype dan proposal system.
2	Analsiis Sistem	Struktur organisasi, Job description, hasil wawancara, dokumentasi, pengamatan, textbook dan journal.	Tahap awal amelakukan analisis dokumen, penerimaan pencatatan transaksi, dokumen pendukung,	Metode Pengkodean dan Pemodelan (rancangan awal).
3	Desain Sistem	Pemodelan awal dan Metode pengkodean.	Membangun system akuntansi, Permodelan Sistem	Blue print, DFD, Kamus Data dan data coding.
4	Desain Database	DFD, Kamus Data dan data coding.	Menyusun model database	Model Relasional Database.
5	Desain Aplikasi	Model Relasional database	Menyusun menu aplikasi beserta content-nya.	Menu Aplikasi dan kebutuhan hardware.

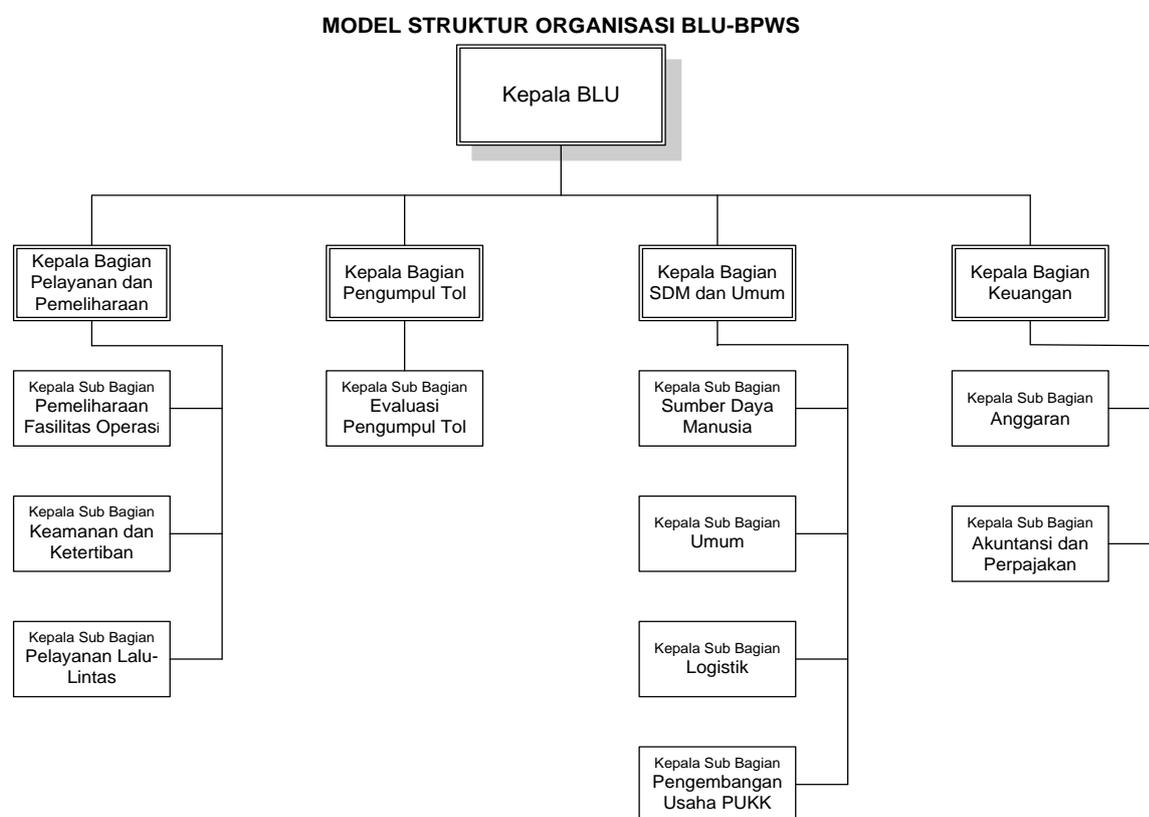
6	Perancangan Sistem	Aplikasi sisten yang diperbaharui.	Testing	Model SIA Jalan Tol Suramadu
7	Implementasi	Model SIA Jalan Tol	Diterjemahkan ke programmer	Software model perancangan SIA Jalan Tol
8	Pemeliharaan Sistem	Software	Installing, sosialisasi dannworkshop dan penyempurnaan	SIA Jalan Tol Suramadu yang memadai

Sumber: Hasil Olahan, 2012

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rancangan Struktur Organisasi BLU BPWS

Struktur organisasi diperlukan untuk mengetahui jenjang otoritas, wewenang, hubungan antara karyawan, maupun tanggung jawab masing-masing. Struktur organisasi juga memudahkan pimpinan BLU dalam mengatur dan mengkondisikan unit kerja atau bagian-bagian yang terlibat di suatu organisasi dalam usaha mencapai visi misi yang ditetapkan. Berikut ini adalah model Struktur Oranisasi BLU-BPWS.



Sumber: Hasil Olahan, 2012

4.2 Identifikasi Kebutuhan Database

Kebutuhan database sistem informasi akuntansi perusahaan jalan tol pada BLU BPWS terdiri dari data lalu lintas kendaraan yang melewati jembatan tol Suramadu, Data komposisi kendaraan, data volume kendaraan dan data elemen biaya.

Golongan	2009	2010	2011	Rata-rata			Rata-rata/Golongan
	Jun-Des	Jan-Des	Jan-Mei	2009	2010	2011	
Gol I	1,934,518	3,164,801	1,249,988	276360	263733	249998	263364
Gol II	297,204	506,641	250,902	42458	42220	50180	44953
Gol III	3,073	18,135	8,736	439	1511	1747	1232
Gol IV	965	2,372	1,553	138	198	311	215
Gol V	1,755	1,696	583	251	141	117	170
Gol VI	4,232,892	8,448,895	3,770,533	604699	704075	754107	687627

Berdasarkan tabel diatas, maka data volume kendaraan terdiri dari:

1. Data Golongan Kendaraan
2. Data Hari
3. Data tarif tol
4. Data rata-rata kendaraan yang lewat
5. Data pendapatan tol

Golongan	Komposisi
Kendaraan golongan I, sedan, jip, pickup/truk kecil dan bus Rp30.000	14%
Kendaraan golongan II, truk dengan 2 gandar Rp45.000	6%
Kendaraan golongan III, truk dengan 3 gandar Rp60.000	11%
Kendaraan golongan IV, truk dengan 4 gandar Rp75.000	10%
Kendaraan golongan V, truk dengan 5 gandar atau lebih Rp90.000	9%
Kendaraan bermotor roda 2 (golongan VI) Rp3.000.	12%
TOTAL	63%

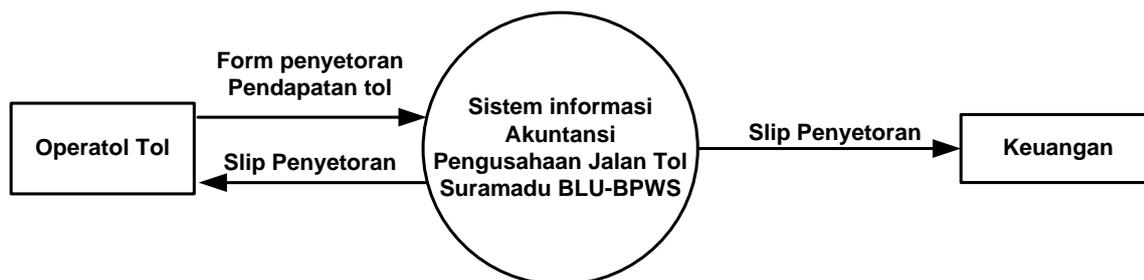
Berdasarkan tabel diatas database komposisi kendaraan terdiri dari:

1. Data Golongan kendaraan
2. Data Jenis kendaraan
3. Data Tarif kendaraan
4. Data Persentase kendaraan yang lewat
5. Data hari

Asumsi dasar yang digunakan dalam perancangan sistem ini adalah: rancangan ini berbasis computer, SIA yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasi pada bentuk organisasi lain, Output dari rancangan ini adalah LK yang sesuai standar kebutuhan BLU-BPWS. Output berupa Laporan Realisasi Bisnis Anggaran (RBA) merupakan suplemen LK.

4.3 Context Diagram

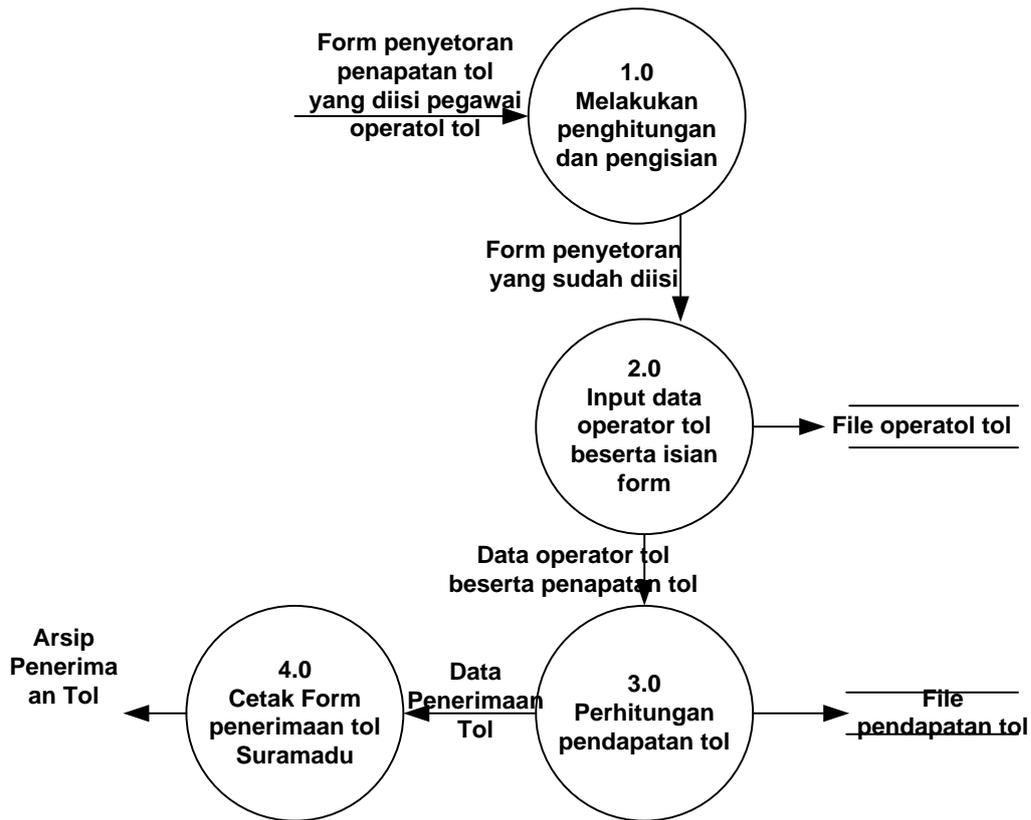
Context Diagram atau Diagram konteks merupakan alat untuk struktur analisis, pendekatan ini mencoba untuk menggambarkan sistem secara garis besar atau keseluruhan pada diagram konteks ini dianalisa terlebih dahulu sistem informasi yang dibuat apakah akan menghasilkan informasi apa saja, sumber informasi yang dibutuhkan dengan tujuan dari informasi yang dihasilkan. Selain itu Diagram konteks juga merupakan suatu diagram yang dapat memperlihatkan daerah objek-objek studi dari aliran data. Context Diagram SIA perusahaan jalan tol suramadu dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hasil Olahan, 2012

4.4 Data Flow Diagram (DFD)

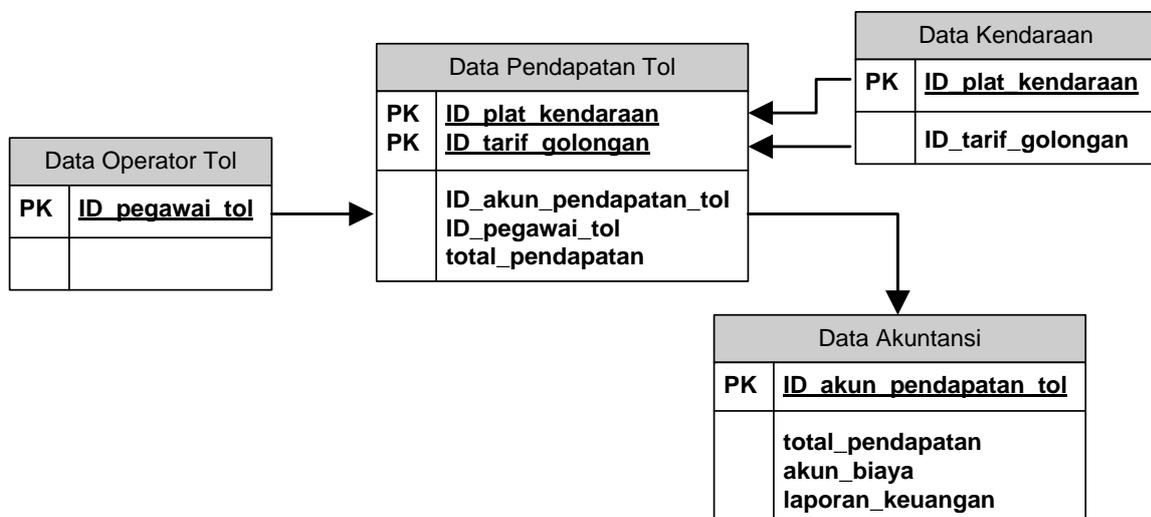
DFD merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur. Keuntungan yang didapat dari penggunaan Data Flow Diagram ialah aliran datanya dapat dengan mudah dimengerti, dan merupakan suatu gambaran dari semua aktivitas yang terjadi dalam proses kegiatan yang terjadi. Dalam proses Perusahaan jalan Tol Suramadu, DFD digambarkan pada gambar berikut:



Sumber: Hasil Olahan, 2012

4.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) sistem informasi akuntansi perusahaan jalan tol Suramadu dapat digambarkan sebagai berikut:



V. KESIMPULAN, SARAN DAN PENELITIAN LANJUTAN

5.1 Kesimpulan

Rancangan model yang dihasilkan dari penelitian ini adalah dimulai dari perusahaan jalan tol sesuai fokus penelitian. Rancangan model tersebut hanya dapat diimplementasikan pada BLU-BPWS dan sebagai pilot project pengembangan aktivitas BLU-BPWS.

5.2 Saran

Adapun saran untuk BLU BPWS yaitu: merapikan penyelenggaraan administrasi seluruh proses kegiatan perusahaan jalan tol, penambahan sumber daya organisasi (komputer), mempersiapkan diri pada SIA perusahaan jalan tol dengan model yang diusulkan serta update website BPWS secara berkala.

5.3 Penelitian Lanjutan

Penelitian ini dapat dikembangkan pada model sistem BLU pada Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, dll, selanjutnya skema rancangan tidak hanya pada aktivitas akuntansi, tetapi bisa juga dijalankan pada divisi marketing, investasi, pembiayaan, dll, serta pendekatan sistem yang lain selain DFD dan ERD bisa digunakan sesuai literature review yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka, Putra Yudistira. 2012. Analisis Performansi Jaringan Pada Sistem Pembayaran Tol Elektronik Berbasis Radio Frequency Identification (RFID). Proceeding Seminar Tugas Akhir Jurusan Teknik Elektro. Fakultas Teknologi Informasi. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya
- Hariyono, Bayu. Sistem Informasi Pencatatan Kecelakaan Lalu Lintas dan Mobil Mogok di Sepanjang Jalan Tol PT Jasa Marga (Persero). Fakultas Sains Dan Teknologi. Diploma Tiga Sistem Informasi
- Karsaman, Rencana Penerapan Sistem Pengumpulan Elektronik (Electronic Toll Collection System) di Indonesia. Institut Teknologi Bandung. Program Studi Teknik Sipil. Bandung
- Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Perpres No 27 Tahun 2008. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura
- Kirom, Fatchul. 2010. Sistem Informasi Pengaduan Pada Jalan Tol (Studi Kasus PT. Jasa Marga Persero, Tbk Cabang Surabaya Gempol
- Panduan Penyusunan Hibah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. 2012. Universitas Airlangga. Surabaya
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006. Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008. Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
- Ramadan, Alfri Vidian. 2012. Toll Acceptance Of Accounting System Services In Operator Lintasindo Branch Of Mertapada Cirebon. Gunadarma University Library. <http://library.gunadarma.ac.id>
- Sasongko, M.Zuhdi. 2011. Dokumentasi dan Identifikasi Value Proses Perencanaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Badan Layanan Umum (BLU) Perguruan Tinggi Negeri (Studi Kasus: Universitas Negeri Semarang. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya
- Safir, Izzi. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Sebagai Badan Layanan Umum.

http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=detail&d_id=7492 diakses 8 Mei 2012, pkl

16.27

Septi, Atik. 2012. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan BLU. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ilmu Pemerintahan

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan Negara

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perbendaharaan Negara

Whitten, 2001. System Analysis and Design Methods. McGraws Hill. 5th Edition